



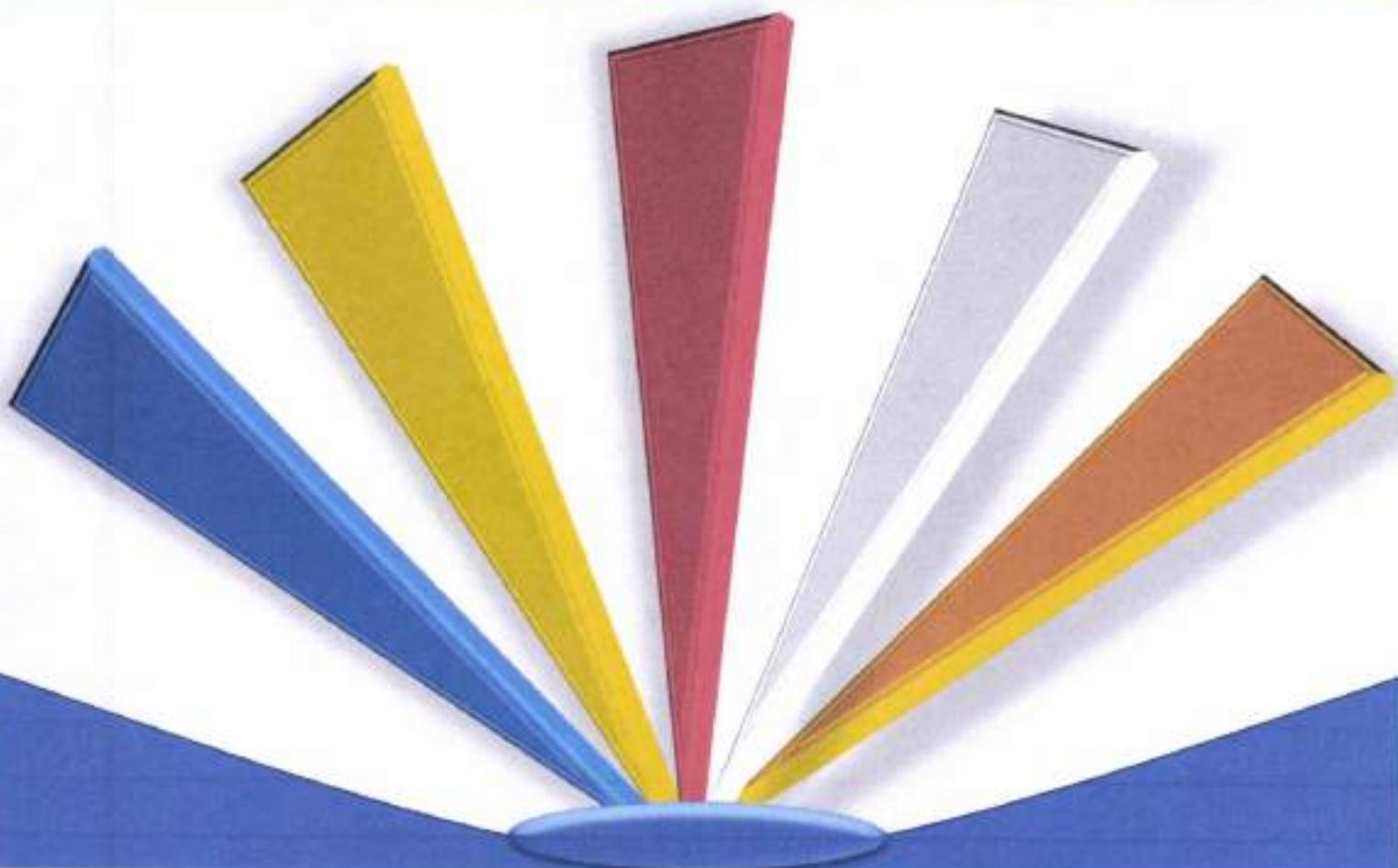
KEMENTERIAN AGAMA RI

# LAPORAN KINERJA DITJEN BIMAS BUDDHA TAHUN 2019

JAKARTA, 2020



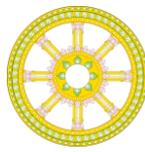
# LAPORAN KINERJA TAHUN 2019





## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BIMAS BUDDHA .....	2
C. ORGANISASI DITJEN BIMAS BUDDHA .....	3
D. PROFIL SDM DITJEN BIMAS BUDDHA .....	5
E. ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN UTAMA .....	6
F. SISTEMATIKA PELAPORAN .....	13
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	15
B. PERJANJIAN KINERJA .....	19
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. PENGUKURAN KINERJA .....	21
B. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN .....	44
C. SUMBER DAYA DITJEN BIMAS BUDDHA .....	50
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>54</b>



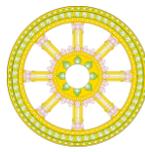
## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah instansi pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Agama. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang bimbingan masyarakat Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengemban tugas melaksanakan program bimbingan masyarakat Buddha. Dalam melaksanakan program bimbingan masyarakat Buddha dituntut harus dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan salah satunya dengan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2019, yaitu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

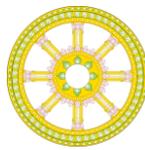


Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 302 Tahun 2015 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan keagamaan Buddha;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



### C. ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Urusan dan Pendidikan.

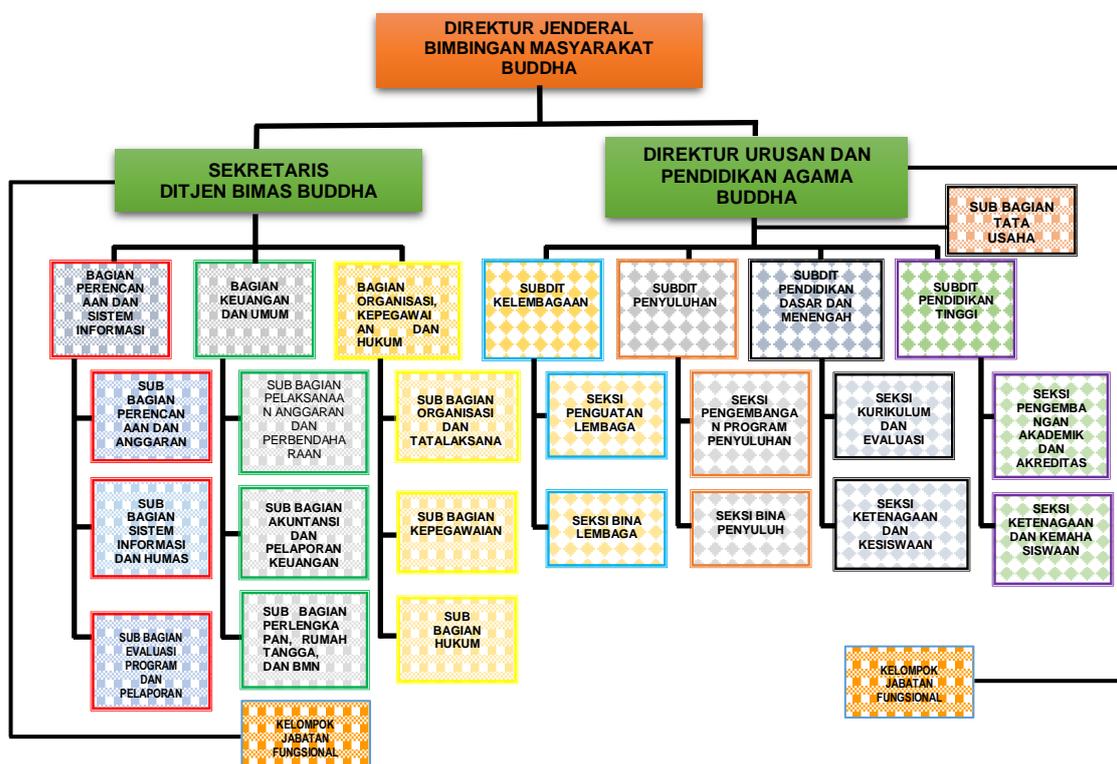
Adapun tugas unit dan jabatan yang ada pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah sebagai berikut:

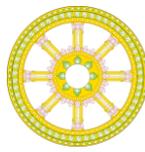
Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang urusan dan Pendidikan agama Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Ditjen Bimas Buddha berdasarkan PMA 42 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Ditjen Bimas Buddha

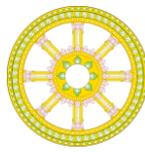




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki pegawai di kantor wilayah tingkat Provinsi yaitu Pembimbing Masyarakat Buddha yang bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan system informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Untuk tingkat Kanwil Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara/seksi bimbingan masyarakat Buddha. Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha bertugas melakukan pelayanan bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Buddha. Penyelenggaran Bimbingan Masyarakat Buddha bertugas melakukan pelayanan bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Buddha. Pembimbing Masyarakat Buddha sebanyak 34, Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha 4, dan Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Buddha sebanyak 35.

Sesuai dengan organisasi di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai visi dan misi organisasi tahun 2019 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 96 orang pegawai pusat yaitu 66 ASN dan 30 pegawai non PNS. Untuk satuan kerja daerah jumlah sumber daya manusianya adalah 164 orang pegawai yaitu 124 ASN dan 40 orang pegawai non PNS. Untuk pegawai satuan kerja daerah terbagi atas struktur organisasi Kementerian Agama tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dan kota.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia tersebut tidaklah membuat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha patah semangat dalam mencapai visi dan misi organisasi. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengusulkan penambahan pegawai saat dibuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang mendapat kuota sebanyak 20 formasi calon pegawai negeri sipil.



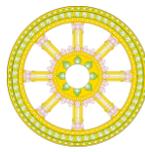
## **E. PROFIL SDM DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

Pegawai struktural pusat dan daerah yang berjumlah 260 orang. Pegawai unit kerja pusat sebanyak 96 orang dan satuan kerja daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 164 orang. Pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri dari pegawai PNS berjumlah 190 orang dan pegawai non PNS berjumlah 70 orang. Untuk pegawai pusat dengan susunan eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 2 orang, eselon III sebanyak 7 orang, dan eselon IV sebanyak 18 orang, jabatan pelaksana sebanyak 34 orang dan jabatan fungsional sebanyak 4 orang. Untuk pegawai daerah terdiri dari Pembimas Buddha sebanyak 33 orang, Seksi Bimas Buddha sebanyak 4 orang, Penyelenggara Buddha 35 orang, dan jabatan pelaksana di daerah sebanyak 53 orang dan 40 pegawai non PNS.

Selain pegawai struktural Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha juga memiliki tenaga bidang agama yaitu penyuluh agama Buddha sebanyak 48 penyuluh PNS dan 2.174 penyuluh non PNS. Untuk pegawai bidang Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki guru agama Buddha sebanyak 578 orang dengan NIP Kementerian Agama, 117 orang dengan NIP Pemerintah Daerah, 113 dengan NIP Dinas Pendidikan dan Pengawas Guru Pendidikan Agama Buddha sebanyak 20 orang.

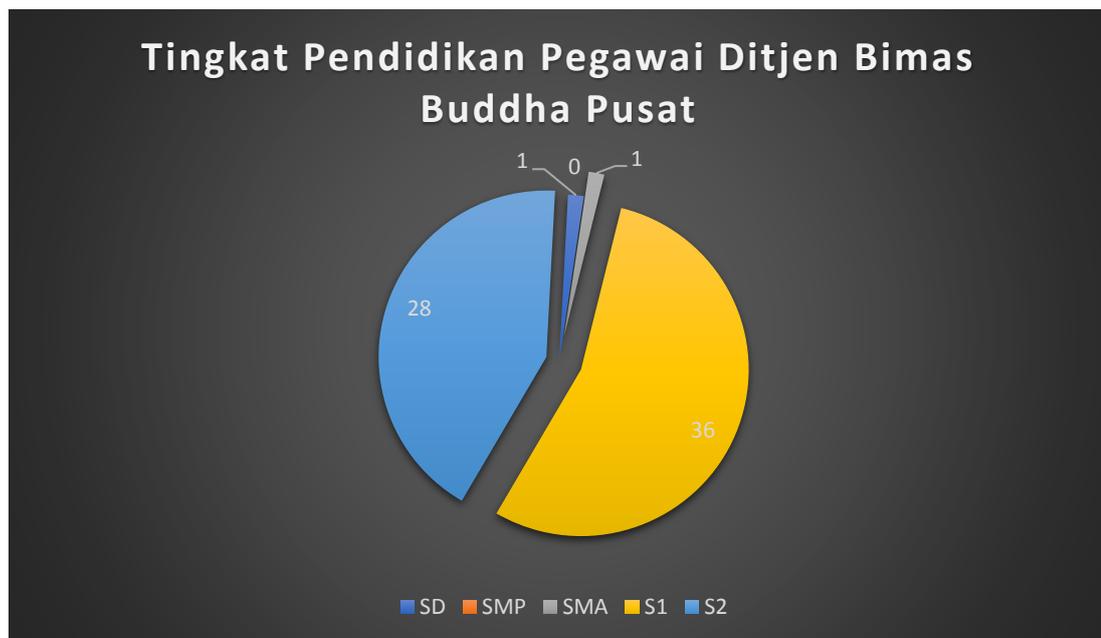
Cakupan wilayah binaan yang luas membuat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berusaha untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan tenaga bidang layanan yang proporsional yaitu penyuluh agama Buddha. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2019 yang lebih efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah menempatkan pegawai yang tepat dan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

Dengan komposisi dan jumlah SDM yang demikian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tetap dengan optimis mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mencapai visi dan misi organisasi tahun 2015 – 2019. Profil pendidikan pegawai pusat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah sebagai berikut:



Grafik 1.1.

Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Bimas Buddha Pusat



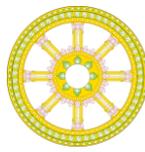
#### E. ISU STRATEGIS, POTENSI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu strategis, potensi dan permasalahan utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha pada bidang agama dan pendidikan agama Buddha adalah sebagai berikut:

##### 1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Buddha

Potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Buddha, antara lain:

- Adanya warisan budaya nusantara yang sangat luhur yang merupakan jati diri Bangsa Indonesia berupa kearifan lokal, budi pekerti yang dilaksanakan masyarakat Indonesia yang masih tetap dijalankan oleh masyarakat Buddha di Indonesia sampai dengan saat ini;
- Penyuluh atau tenaga teknis keagamaan Buddha yang memiliki potensi besar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan umat dalam urusan pelayanan keagamaan Buddha (urusan kelahiran, perkawinan dan kematian) serta dapat menyampaikan program pemerintah melalui bahasa agama; dan



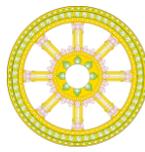
- c. Tingginya tingkat partisipasi umat Buddha dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan Buddha. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan keagamaan Buddha, antara lain perayaan hari raya Keagamaan Buddha, puja bakti, penghayatan dhamma, pelatihan meditasi, pendalaman kitab suci, serta pelestarian budaya Buddhis.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha, antara lain:

- a. Adanya kesenjangan antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama Buddha dengan perilaku sehari-hari umat, dimana di satu sisi berbagai kegiatan keagamaan tampak semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat partisipasi dan semangat umat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, tetapi di sisi yang lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap terjadi, antara lain ditandai dengan masih adanya tindakan kriminalitas, kasus asusila, penipuan, penyalahgunaan narkoba dan korupsi;
- b. Adanya potensi konflik sebagai akibat pemahaman sempit terhadap ajaran agama dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan dan kerukunan intern umat Buddha. Gejala itu tampak dari berbagai aktifitas yang belum dilaksanakan secara bersama-sama, lebih cenderung di dalam kelompoknya sendiri sendiri;
- c. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional sebagai dampak dari keterbukaan di era globalisasi tetapi tidak diiringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama, sehingga tidak jarang muncul penafsiran ajaran agama sesuai dengan kepentingan masing-masing;
- d. Semakin banyaknya rohaniwan-rohaniwan asing yang datang ke Indonesia yang membawa berbagai paham keagamaan Buddha serta menyiarkannya kepada masyarakat Buddha.

## **2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama Buddha**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama, antara lain:



- a. Adanya peran tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda Buddha yang dapat memberikan edukasi kepada umat Buddha terkait dengan kerukunan;
- b. Adanya jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga keagamaan Buddha dalam ikut memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama;
- c. Adanya media edukasi kepada umat Buddha yang bersumber dari Naskah Sastra, Sutra, Jataka yang berasal dari Tri Pitaka yang memuat sesanti Bhinneka Tunggal Ika pesan-pesan kerukunan;
- d. Meningkatnya kualitas kerukunan yang tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama Buddha dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.

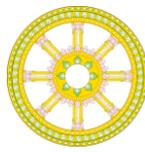
Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama, antara lain:

- a. Masih adanya sikap fanatisme sempit terhadap tradisi atau mazhab tertentu yang memandang tradisi atau mazhab lain tidak sesuai dengan ajaran Buddha;
- b. Adanya kecenderungan dari sebagian tokoh agama Buddha untuk membentuk organisasi keagamaan Buddha yang sejenis;
- c. Adanya klaim sepihak oleh umat Khonghucu atas Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) yang biasa disebut kelenteng yang merupakan salah satu mazhab agama Buddha;
- d. Adanya upaya sistematis dan terorganisir dalam perekrutan umat Khonghucu terhadap umat beragama Buddha.

### **3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Buddha**

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, antara lain:

- a. Adanya struktur Bimbingan Masyarakat Buddha yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan memudahkan umat Buddha untuk mendapatkan pelayanan dibidang urusan agama Buddha dan pendidikan agama dan keagamaan Buddha;



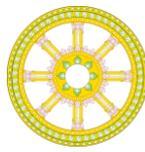
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Buddha, terutama tokoh agama, pandita, dharmaduta dan juga lembaga keagamaan Buddha dalam penyediaan pelayanan kepada umat Buddha.

Hal ini menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas dibidang pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan perkawinan dimana yang harus berhubungan dengan institusi lain yaitu Dinas Kependudukan untuk mendapatkan akte perkawinan, penyediaan sarana ibadah, bimbingan dan penyuluhan agama bagi umat Buddha.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, antara lain:

- a. Tenaga pelayanan keagamaan Buddha belum memadai, baik dari segi jumlah yang dibutuhkan maupun distribusinya;
- b. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada petugas penyedia layanan masyarakat seperti tenaga pembimbing dan penyuluh agama baik PNS maupun Non PNS, pemuka agama, tokoh agama, dharmaduta serta pandita;
- c. Pada beberapa daerah belum memiliki struktur organisasi, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan keagamaan kepada masyarakat agama Buddha;
- d. Belum adanya regulasi dan sarana prasarana dalam pelayanan perkawinan, dan kematian bagi masyarakat Buddha di seluruh Indonesia;
- e. Belum memanfaatkan teknologi dan informasi dalam melakukan pelayanan keagamaan Buddha, karena belum tersedianya sarana dan prasarana layanan online.

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui pembinaan dan pelayanan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Pembinaan, pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha yang menjadi wewenang Direktorat



Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga Pendidikan keagamaan.

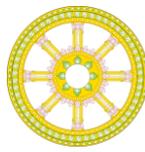
#### 1. Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

- a. Adanya regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- b. Adanya lembaga pendidikan tinggi agama Buddha yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik dibidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- c. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan guru agama Buddha seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agama Buddha dan Kelompok Kerja Guru (KKG) agama Buddha dan Asosiasi Pengawas Pendidikan Agama Buddha Indonesia (APPABI);
- d. Adanya regulasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi bagi guru-guru pendidikan agama Buddha;
- e. Adanya Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis (BKPB) sebagai wadah bagi sekolah umum yang dikelola oleh yayasan pendidikan agama Buddha;
- f. Adanya siswa beragama Buddha pada sekolah umum yang masih tersebar dalam berbagai jenjang satuan pendidikan.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

- a. Kebutuhan guru dan dosen pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum masih belum memadai;
- b. Peserta didik pada satuan pendidikan umum masih banyak yang belum terlayani karena tidak tersedianya guru agama Buddha, sehingga mereka harus mengikuti pelajaran agama Buddha yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dikelola oleh rumah ibadah dalam bentuk Sekolah Minggu Buddha dan Dhamma Sekha;



- c. Belum tersedianya standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;
- e. Masih lemahnya penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- f. Masih belum maksimal dan efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP pendidikan agama Buddha dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan umum;
- g. Masih kurangnya jumlah pengawas pendidikan agama Buddha dan kompetensi pengawas masih perlu ditingkatkan.

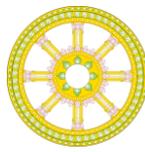
## 2. Pendidikan Keagamaan Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan Mutu Pendidikan Keagamaan Buddha, antara lain:

- a. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha;
- b. Tingginya kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan Buddha;
- c. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Buddha bersifat mandiri.

Sejumlah permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan keagamaan, antara lain:

- a. Belum adanya standarisasi pendidikan keagamaan Buddha dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha yang dilakukan oleh lembaga swasta;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
- c. Belum tersedianya standar untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan Buddha;
- d. Belum adanya standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha;
- e. Terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan kelembagaan pendidikan keagamaan Buddha;



- f. Lemahnya penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Buddha;
- g. Belum adanya format pengembangan pendidikan keagamaan Buddha secara berjenjang dalam mewujudkan ahli agama Buddha.

### 3. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi keagamaan Buddha antara lain:

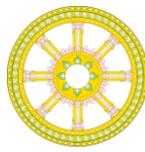
- a. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan;
- b. Mutu lembaga tinggi keagamaan, meski baru dalam jumlah kecil namun telah menunjukkan peningkatan;
- c. Lembaga pendidikan tinggi keagamaan telah menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang lain di Asia.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses, dan mutu pendidikan tinggi keagamaan, antara lain:

- a. Penyelenggaraan pendidikan pendidikan tinggi yang lebih banyak dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait koordinasi dan standarisasi pelayanan;
- b. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
- c. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
- d. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan tinggi;
- e. Masih rendahnya kualitas hasil riset, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil riset serta karya akademis lainnya.

### 4. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, antara lain:



- a. Adanya perbaikan sistem rekrutmen, penempatan dan evaluasi pegawai;
- b. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Bimas Buddha;
- c. Telah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, antara lain:

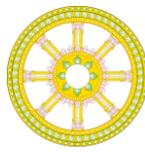
- a. Kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur Ditjen Bimas Buddha masih rendah;
- b. Masih adanya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
- c. Belum tersedianya data valid tentang data keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berakibat pada perencanaan yang kurang baik;
- d. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, khususnya pada struktur satker Bimas Buddha baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- e. Adanya satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang memiliki anggaran/DIPA dan umat yang akan dilayani, tetapi tidak ada struktur organisasinya.

## F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Ditjen Bimas Buddha Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi



## **1. Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019

## **2. Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

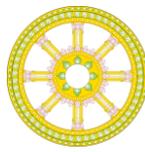
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## **3. Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## RERENCANAAN KINERJA

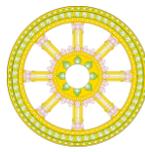
### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diharapkan dalam rentang waktu tertentu. Renstra Ditjen Bimas Buddha disusun untuk jangka waktu menengah periode tahun 2015 – 2019 menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2019. Penyusunan renstra tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mengacu pada dokumen perencanaan dan kebijakan strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019. Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 436 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2015 – 2019. Dalam renstra secara umum memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategiS sebagai berikut:

### VISI

#### **“Terwujudnya Masyarakat Buddha Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Harmonis, Cerdas dan Sejahtera”**

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Taat memiliki pengertian bahwa masyarakat Buddha mampu menjalankan setiap kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Masyarakat Buddha yang rukun memiliki pengertian bahwa masyarakat Buddha selalu berusaha mengembangkan keselarasan dan kerukunan baik intern maupun antar umat beragama, sehingga tercipta suasana harmonis dalam masyarakat Buddha. Masyarakat Buddha yang cerdas berarti Masyarakat Buddha yang memiliki kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta



sains dan teknologi, mampu berfikir rasional, inovatif dan kreatif serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari; kecerdasan emosional yaitu kecerdasan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain; serta kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Agama Buddha dalam pikiran, ucapan dan tindakan. Masyarakat Buddha yang sejahtera berarti masyarakat Buddha yang aman, selamat, makmur serta sentaosa, terlepas dari berbagai gangguan, yang berarti juga sejahtera lahir dan batin.

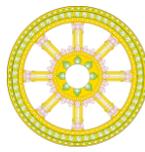
### MISI

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk mental umat Buddha;
2. Meningkatkan kerukunan intern umat beragama Buddha dalam memperteguh kebhinekaan;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama Buddha yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkarakter;
5. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan tepercaya

### TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Tujuan bidang agama
  - a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Buddha dalam sikap dan kehidupan sehari-hari;
  - b. Meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai kualitas kerukunan umat beragama;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan memberdayakan lembaga – lembaga sosial keagamaan Buddha;
  - d. Meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama
2. Tujuan bidang Pendidikan



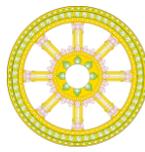
- a. Meningkatkan akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha;
- c. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan agama dan pendidikan agama Buddha tingkat dasar dan menengah;
- d. Meningkatkan akses pendidikan tinggi agama Buddha khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi agama Buddha

## SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menetapkan 8 sasaran strategis. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian Agama dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

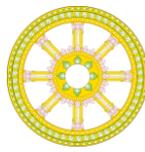
Sasaran Strategis bidang agama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; 2) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan; 2) meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan; 3) meningkatnya jumlah naskah, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha



Sasaran strategis bidang Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha adalah sebagai berikut:

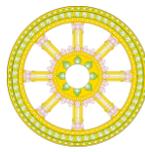
- a. Meningkatnya akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah, dengan indikator 1) meningkatnya Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
- b. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha tingkat dasar dan menengah, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan; 2) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha; 3) meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku; 4) meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM; 5) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP; 6) meningkatnya jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha; 7) meningkatnya jumlah naskah norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun;
- c. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; 2) jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi; 3) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi; 4) meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima insentif/ tunjangan;
- d. Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik; 2) meningkatnya jumlah Mahasiswa penerima beasiswa miskin; 3) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan mahasiswa Buddhis;
- e. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan indikator 1) Meningkatnya jumlah fasilitasi pengabdian berbasis program pada masyarakat; 2) Meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan PTAB; 3) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang



- memenuhi SPM; 4) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP; 5) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi; 6) meningkatnya jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B; 7) meningkatnya jumlah sarana dan prasarana PTAB yang memenuhi standar; 8) meningkatnya jumlah perpustakaan PTABN yang ditingkatkan koleksi dan prasarananya; 9) meningkatnya jumlah layanan penyelenggaraan pendidikan pada PTABN; 10) Meningkatnya jumlah fasilitasi penelitian pada PTAB; 11) meningkatnya jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional; 12) meningkatnya jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI; 13) Meningkatnya jumlah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); 14) meningkatnya jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria perguruan tinggi; 15) meningkatnya jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan pada PTAB;
- f. Meningkatkan Kualitas Tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha, dengan indikator 1) meningkatnya jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan dosen PTAB; 2) meningkatnya jumlah Dosen yang tersertifikasi; 3) meningkatnya jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3; 4) meningkatnya jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya; 5) meningkatnya jumlah dosen yang menerima tunjangan fungsional; 6) Meningkatnya jumlah Dosen Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi; 7) meningkatnya jumlah guru yang disertifikasi oleh PTABN melalui PPG.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.



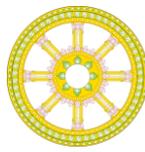
Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2019 didasarkan pada Sasaran Strategis, Indikator kinerja utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi anggaran berbasis kinerja mengacu pada renstra Ditjen Bimas Buddha tahun 2015 – 2019. Sebagai tanggungjawab kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja dengan kata lain perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh Ditjen Bimas Buddha selaku penerima tanggungjawab dari Menteri Agama.

Sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja tahun 2019 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat Buddha	Indeks keshalihan sosial umat Buddha	70
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan Buddha	1. Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum	75%
	2. Indeks layanan keagamaan	75
3. Meningkatnya akses layanan Pendidikan agama	1. APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha	0.006
	2. Persentase siswa penerima bidik misi yang dapat melanjutkan pendidikan	100%
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	1. Nilai zona integritas	70
	2. Persentase TLHP	75%
	3. Nilai SAKIP	70



## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran dituangkan dalam bentuk angka dari 0 sampai 100 + N yang kemudian diberikan kategori peringkat dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria/kategori Capaian Kinerja

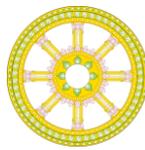
< 100	Sangat baik
80 - 100	Baik
50 - 79	Cukup
X > 50	Kurang

Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh capaian kinerja organisasi. Capai kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2019 adalah **106,04%**. Capaian tersebut diperoleh dari capaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai
1. Indeks keshalihan sosial umat Buddha	121,49%
2. Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hokum	95,46%
3. Indeks layanan keagamaan	130,62%
4. APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha	100%



5. Persentase siswa penerima bidik misi yang dapat melanjutkan pendidikan	103,43%
6. Nilai zona integritas	97,05%
7. Persentase TLHP	92,93%
8. Nilai SAKIP	107,35%
Capaian Kinerja Organisasi	106,04%

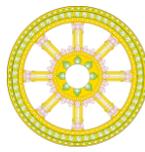
Capaian kinerja organisasi dalam rentang waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1

Tren Capaian Kinerja Organisasi 2015 – 2019



Dalam perjalanan waktu 2015 – 2019 sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 indikator kinerja utama berbasis output kegiatan, tahun 2016 dan 2017 indikator kinerjanya sebagian output dan sebagian outcome. Untuk tahun 2018 dan 2019 sasaran strategis dan indikator kinerja utama mengalami perubahan namun tidak signifikan dan sudah berbasis outcome. Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:



## **Sasaran strategis 1: Meningkatnya kualitas kehidupan umat Buddha**

Table 3.3  
Capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 1

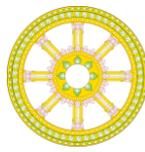
Nama IKU	Target	Realisasai	Capaian Kinerja
Indeks keshalihan sosial umat Buddha	70	85,044	121,49%

Realisasi indeks keshalihan sosial umat Buddha tahun 2019 adalah 85,044 dengan capaian kinerja 121,49%. Angka ini diperoleh dari hasil riset yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Riset dilakukan selain untuk mengukur indeks keshalihan sosial umat beragama juga untuk mengetahui indeks keshalihan sosial nasional sebagai penilaian indikator kinerja utama tingkat Kementerian Agama. Keshalihan sosial didefinisikan sebagai sikap dan tindakan pemeluk agama dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mencerminkan kepedulian sosial, menghormati keberagaman (kebhinekaan), berbudi pekerti, menjaga kelestarian lingkungan, dan patuh pada aturan negara serta norma kemasyarakatan (sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama). Dalam riset indeks keshalihan sosial umat beragama focus pada lima dimensi sosial yaitu:

1). Kepedulian sosial mendapatkan skor nilai 79,49 dengan indikator yang diukur adalah:

Indikator penilaian	Skor	Korelasi
1. Bersedekah	85,31	0,829
2. Bakti sosial	82,97	0,791
3. Memberi bantuan saat musibah	82,34	0,695
4. Menjalin silaturahmi	83,13	0,728
5. Menyapa saat berjumpa	92,03	0,700

2). Relasi antar manusia mendapatkan skor nilai 91,22 dengan indikator yang diukur adalah:



<b>Indikator penilaian</b>	<b>Skor</b>	<b>Korelasi</b>
1. Menghargai budaya suku lain	93,59	0,769
2. Memberlakukan sama orang lain yang berbeda	90,00	0,755
3. Memanfaatkan kearifan lokal	90,94	0,809
4. Mencela fisik karena perbedaan suku dan ras	90,47	0,536
5. Memelihara tradisi yang baik	91,09	0,793

3).Etika dan budi pekerti mendapatkan skor nilai 89,36 dengan indikator yang diukur adalah:

<b>Indikator penilaian</b>	<b>Skor</b>	<b>Korelasi</b>
1. Menghargai waktu	88,75	0,877
2. Bersikap jujur	91,72	0,871
3. Memiliki kesetiaan	90,16	0,866
4. Menjaga rahasia	87,81	0,853
5. Memiliki komitmen	91,25	0,848

4). Melestarikan lingkungan mendapat skor nilai 79,33 dengan indikator yang diukur adalah:

<b>Indikator penilaian</b>	<b>Skor</b>	<b>Korelasi</b>
1. Mengurangi penggunaan plastik	76,25	0,856
2. Menggunakan kembali barang dari plastik	73,59	0,856
3. Menanam kembali	77,66	0,834
4. Terlibat dalam kegiatan daur ulang sampah	65,16	0,785
5. Menjaga kebersihan lingkungan	87,97	0,776

5). Patuh pada pertauran negara mendapat skor nilai 85,82 dengan indikator yang diukur adalah:

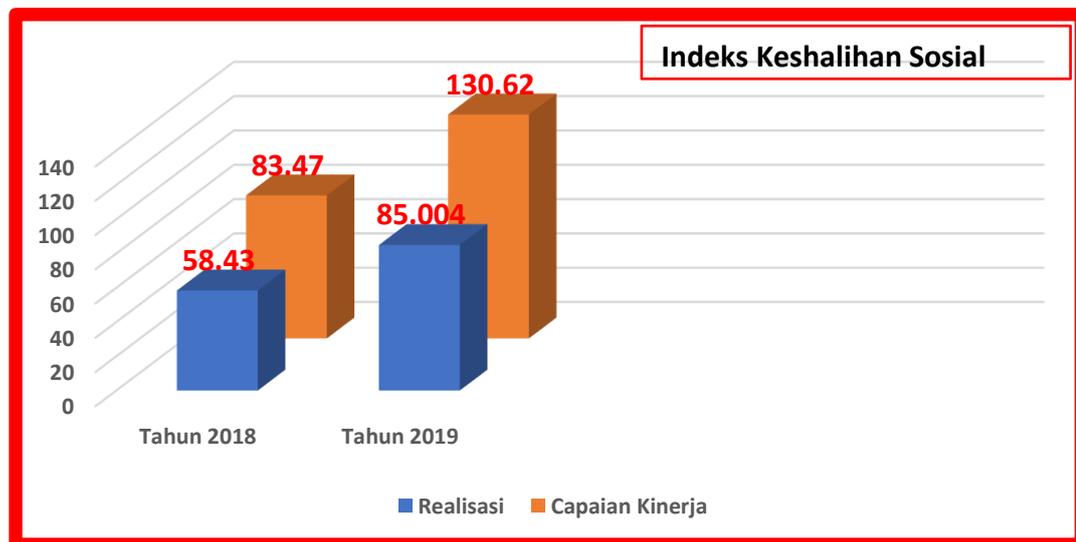


Indikator penilaian	Skor	Korelasi
1. Undang-undang yang berlaku	85,94	0,883
2. Peraturan daerah	83,59	0,865
3. Pancasila dan UUD	87,97	0,825
4. Peraturan desa	84,22	0,821
5. Setia pada NKRI	89,22	0,776

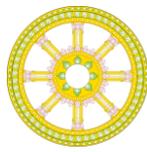
Dengan indeks keshalihan sosial 85,044 pada tahun 2019 berarti indeks keshalihan sosial umat Buddha meningkat dibanding dengan tahun 2018 yang hanya mendapat skor nilai 58,43. Indeks keshalihan sosial umat Buddha masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks keshalihan sosial tingkat nasional yang hanya mendapat skor nilai 83,58. Realisasi dan capaian kinerja IKU indeks keshalihan sosial tahun 2019 dan 2018 adalah:

Grafik 3.2

Indeks Keshalihan Sosial tahun 2018-2019



Keberhasilan pada indikator kinerja utama ini adalah salah satu keberhasilan dari pelaksanaan program bimbingan masyarakat Buddha yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Ditjen Bimas Buddha terus melakukan kegiatan peningkatan dan pemberdayaan penyuluh, peningkatan, pemberdayaan umat, dan peningkatan harmonisasi umat Buddha. Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemberdayaan penyuluh dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dan meningkatkan jumlah penyuluh agama Buddha baik yang PNS maupun Non PNS serta memberdayakan untuk



melakukan pendampingan dan pembinaan umat Buddha. Dari peran para penyuluh inilah program pemerintah khususnya program Ditjen Bimas Buddha dapat tersampaikan kepada masyarakat Buddha salah satunya yaitu peningkatan indeks keshalihan sosial.



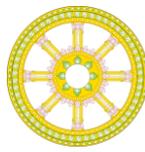
Gambar 3.1. Pembinaan dan Musyawarah Pemuda Buddhis Di Jakarta

Selain pelaksanaan program pencapaian ini juga dipengaruhi oleh jumlah sampling responden tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018 serta daerah yang dipilih oleh Badan Litbang dan Diklat untuk melakukan riset atau survey juga berbeda. Capaian kinerja IKU indeks keshalihan sosial umat Buddha hanya dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2018 karena IKU untuk tahun 2017, 2016 dan 2015 tidak terdapat IKU indeks keshalihan sosial umat Buddha.



Gambar 3.2

Pembinaan Penyuluh Agama Buddha PNS di Jakarta



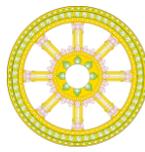
## **Sasaran strategis 2: Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan Buddha**

Table 3.4  
Capaian kinerja IKU 1 Sasaran Strategis 2

Nama IKU	Target	Realisasai	Capaian Kinerja
1. Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum	75% (727)	71,54% (694)	95,46%

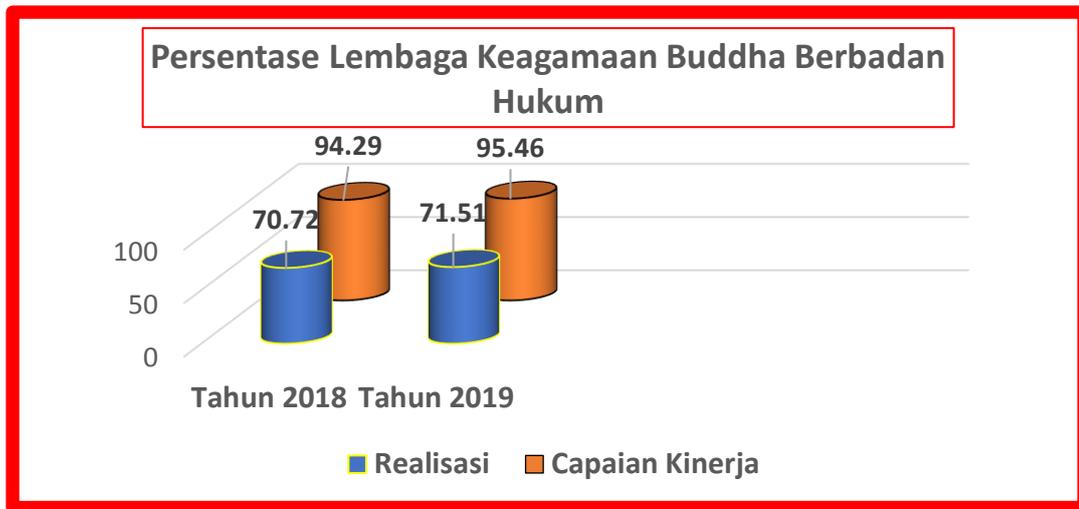
Realisasi indikator kinerja utama persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum adalah 71,54% atau 694 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 95,46%. Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum adalah Lembaga keagamaan Buddha yang teregister atau terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Data yang digunakan untuk menentukan target adalah jumlah Lembaga keagamaan Buddha secara nasional adalah 970 lembaga. target tahun 2019 adalah 75% berarti berjumlah 727 lembaga. Realisasi 71,54% ini didapat dari jumlah lembaga yang terdaftar pada tahun 2019 (694 lembaga) dibagi dengan jumlah Lembaga keagamaan Buddha (970) dikalikan 100. Untuk capaian kinerja 95,46% didapat dari jumlah lembaga yang terdaftar pada tahun 2019 (694 lembaga) dibagi target tahun 2019 (727 lembaga) dikalikan 100. Data lembaga yang terdaftar pada Direktorat Bimbingan Masyarakat Buddha bersumber dari system yang sudah dibangun oleh Ditjen Bimas Buddha yaitu *System Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah (SIORI)*.

Capaian kinerja pada IKU persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Capaian kinerja pada IKU persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum tahun 2018 dan tahun 2019 dalam kategori peringkat baik. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sub direktorat kelembagaan Ditjen Bimas Buddha. Realisasi dan capaian kinerja IKU persentase Lembaga keagamaan Buddha berbadan hukum adalah sebagai berikut:



Grafik 3.3

Persentase lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum



Target IKU tidak tercapai disebabkan karena Ditjen Bimas Buddha belum memiliki data akurat sebagai basis data perencanaan dan penetapan target kinerja tahun 2018 dan 2019 adalah sama. Selain itu ketidak tercapaian ini karena dalam menentukan target kinerja kurang jelas, apakah target 75% itu adalah Lembaga yang terdaftar pada tahun 2019 saja atau komulasi dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja utama ini mulai digunakan pada tahun 2018 berlanjut pada tahun 2019 dan untuk tahun 2017, 2016 dan 2015 tidak ada. Oleh karena itu realisasi dan capaian kinerja IKU persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum hanya dapat disandingkan antara tahun 2018 dan 2019. Meskipun target tidak tercapai Ditjen Bimas Buddha telah melakukan pembinaan terhadap Lembaga keagamaan Buddha melalui kegiatan-kegiatan pembinaan.

Gambar 3.3

Pembinaan Lembaga Keagamaan Buddha  
Di Jakarta



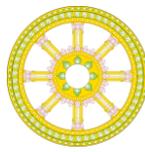


Table 3.5  
Capaian kinerja IKU 2 Sasaran Strategis 2

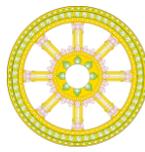
Nama IKU	Target	Realisasai	Capaian Kinerja
1. Indeks layanan keagamaan Buddha	75	97,97	130,62%

Realisasi indikator kinerja utama indeks layanan keagamaan Buddha adalah 97,97 dengan capaian kinerja 130,62%. Angka ini diperoleh dari hasil riset atau survey yang dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil dari survey yang dilaksanakan ini sebagai data pendukung dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Ditjen Bimas Buddha.

Survey kepuasan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan yang diselenggarakan Ditjen Bimas Buddha di Tahun Layanan 2019 dan mengetahui unsur-unsur pelayanan yang memerlukan prioritas perbaikan. Unsur dalam survey kepuasan masyarakat adalah persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, kompetensi pelaksana, Perilaku Pelaksana, sarana dan prasarana, serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Skor nilai yang diperoleh dari dari masing masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Table 3.6  
Hasil survey kepuasan layanan masyarakat

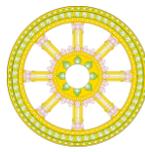
No.	Unsur Pelayanan	$\Sigma$ NILAI / UNSUR	NRR/UNSUR	BOBOT	NRR TERTIM BANG/ UNSUR (3 x 4)	Konversi 100
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3 x 4)	
1.	Persyaratan	341	3,8750	0,14286	0,5536	96.8750



2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	344	3,9091	0,14286	0,5584	97.7273
3.	Waktu Penyelesaian	336	3,8182	0,14286	0,5455	95.4545
4.	Kompetensi Pelaksana	349	3,9659	0,14286	0,5666	99.1477
5.	Perilaku Pelaksana	352	4,0000	0,14286	0,5714	100.0000
6.	Sarana dan Prasarana	345	3,9205	0,14286	0,5601	98,0114
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	347	3,9432	0,14286	0,5633	98,5795
IKM					<b>3,9188</b>	<b>97,9708</b>

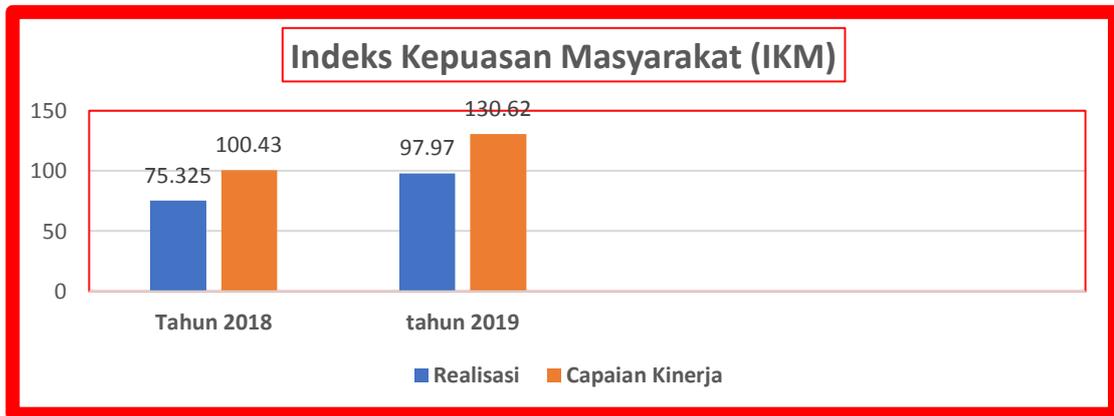
Dari hasil riset/survey ini capaian kinerja Ditjen Bimas Buddha sangat memuaskan dengan capaian 130,62%. Capaian kinerja ini adalah hasil dari pelaksanaan pelayanan Ditjen Bimas Buddha tahun 2019 yang dinilai oleh masyarakat pengguna layanan terutama pada layanan tanda daftar organisasi, rumah ibadah dan penerbitan kartu rohaniwan Buddha. Indeks layanan masyarakat Buddha meningkat signifikan dibandingkan dengan hasil tahun 2018. Capaian kinerja IKU indeks layanan keagamaan Buddha hanya dapat dibandingkan antara tahun 2019 dengan tahun 2018 karena untuk tahun 2017, 2016 dan 2015 tidak terdapat IKU indeks layanan keagamaan.

Realisasi dan Capaian kinerja indikator kinerja utama indeks layanan keagamaan Buddha tahun 2018 dan 2019 adalah:



Grafik 3.4

Hasil Surve Kepuasan Layanan Masyarakat



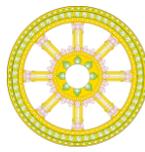
Capaian kinerja yang sangat baik ini karena didukung oleh pegawai Ditjen Bimas Buddha yang benar – benar melayani masyarakat dengan tulus, serta adanya komitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan PASTI (professional, akuntabel, sistematis, transparan dan inovatif) yang menjadi Visi pelayanan Ditjen Bimas Buddha. Pada tahun 2018 Ditjen Bimas Buddha telah melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat berbasis online dengan system yang telah dibangun yaitu SIORI (system informasi organisasi dan rumah ibadah), SIPENA (system informasi penyuluh agama), SIPEKA (system informasi Pendidikan keagamaan). Sampai dengan tahun 2019 sistem yang berjalan dengan baik hanya SIORI yang lain mengalami kendala teknis dan harus mendapat penanganan yang baik untuk dapat dioperasikan kembali.

Sasaran strategis bidang agama yang ada dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dan 2019 tidak dapat dibandingkan dalam target renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja bidang agama dalam renstra 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

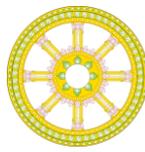
Tabel 3.7

Renstra bidang agama tahun 2015 - 2019

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	INDIKATOR KINERJA	Target					Total Target	Capaian Target					Total Capaian
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
11	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA														
11.1	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha														
	1	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama													
	A	Jumlah Penyuluh Keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan													



			Jumlah Penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan	1,840	1,940	2,015	2,165	2,240	10,200	2,141	1,905	1,844	1,136	2,623	9,649
			Jumlah Penyuluh Non PNS dan Tenaga Teknis Keagamaan yang ditingkatkan kompetensinya	160	160	160	160	160	800	155	145	132	200	0	632
			Jumlah Penyuluh Non PNS dan Tenaga Teknis Keagamaan yang mengikuti pembinaan	500	500	500	500	500	2,500	429	561	500	178	500	2,168
			Jumlah Penyuluh yang mengikuti pembinaan Keluarga Hitasukhaya	80	80	80	80	80	400	75	74	65	78	79.67	372
		2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan internal												-
		A	Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha												-
			Jumlah Tokoh Agama yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha	160	160	160	160	160	800	160	112	160	0	151.12	583
			Jumlah Tokoh Wanita yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha	160	160	160	160	160	800	155	112	124	0	0	391
			Jumlah Tokoh Pemuda yang mengikuti dialog kerukunan intern umat Buddha	160	160	160	160	160	800	140	112	166	0	0	418
			Jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan intern umat Buddha	0	1	1	1	1	4	1	0	1	34	0	36
		A	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan												-
			Jumlah majelis agama buddha yang dibantu	77	77	100	104	110	468	75	72	80	32	0	259
			Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan (Organisasi kepemudaan/ Organisasi Wanita Buddhis/organisasi Sangha/ Lembaga Keagamaan yang dibantu	83	83	100	116	120	502	81	81	90	161	120	533
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Penguatan dan pemberdayaan Pengurus Lembaga Keagamaan Buddha	40	65	50	55	70	280	38	60	45	13	70	226
			Jumlah rumah ibadah yang dibantu	300	300	300	300	300	1,500	331	137	280	47	300	1,095
		B	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan												-
			Jumlah kitab suci agama Buddha	6,250	7,750	7,750	8,000	8,000	37,750	10,000	6,522	7,242	0	8000	31,764
			Jumlah buku keagamaan Buddha	-	5,000	5,000	5,000	173,752	188,752	-	3,500	4,600	1,250	139505	148,855
			Jumlah sarana puja Bhakti agama Buddha	-	1,500	1,600	1,700	1,800	6,600	-	900	1,100	0	0	2,000
		C	Jumlah naskah, norma, standard, prosedur dan kreteria												-
			Jumlah juklak/juknis tentang lembaga dan organisasi keagamaan Buddha	10	10	10	10	10	50	5	7	9	10	0	31
			Jumlah juklak/juknis tentang Rumah Ibadah agama Buddha	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	-
			Jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Buddha	4	4	4	4	4	20	3	1	2	4	0	10
		D	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Buddha												-
			Jumlah event penyelenggaraan Svyamvara Tripitaka Gatha (STG)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			Jumlah event penyelenggaraan Dhamma Camp Pemuda Buddhis	0	1	1	1	1	4	0	1	1	0	0	2



### **Sasaran strategis 3: Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan**

Table 3.8

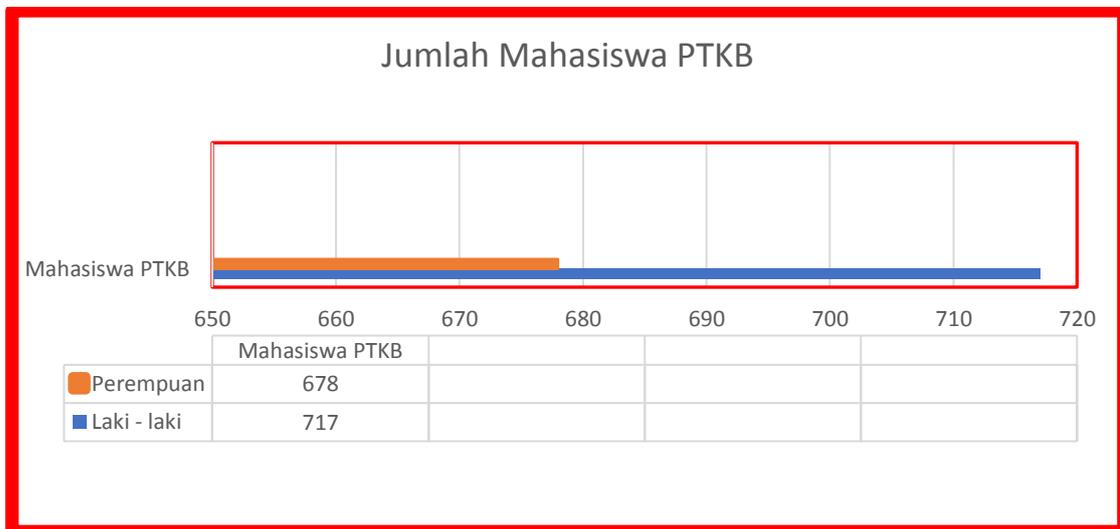
#### Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 3

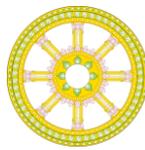
Nama IKU	Target	Realisasai	Capaain Kinerja
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan tinggi keagamaan Buddha	0,006	0,006	100%

Realisasi indikator kinerja utama APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha sebesar 0.006 dengan capaian kinerja 100%. Angka ini diperoleh dari pengolahan data mahasiswa Pendidikan tinggi keagamaan Buddha baik negeri dan swasta serta data jumlah penduduk Indonesia usia kuliah (20 s.d 24 tahun). Jumlah mahasiswa Pendidikan tinggi keagamaan Buddha tahun 2019 mencapai 1.395 orang (sumber data Subdit Pendidikan tinggi Ditjen Bimas Buddha) dan jumlah penduduk Indonesia pada usia 20 sampai dengan 24 tahun berjumlah 21.964.100 orang (sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) 2018). Indikator kinerja utama APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha di awali pada tahun 2018 dan tahun 2015, 2016, dan 2017 tidak tersedia IKU APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha.

Grafik 3.5

#### Jumlah Mahasiswa PTK Buddha Tahun 2019





Grafik 3.6  
Data Penduduk Tahun 2019



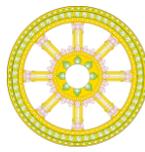
Penghitungan APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha tahun 2019 adalah jumlah mahasiswa dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia usia 20 s.d 24 tahun dikali seratus. Maka hasil dari perhitungan tersebut adalah:

$$APK = \frac{1395}{21.964.100} \times 100 = 0,00635$$

Indikator kinerja utama APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha capaian kinerja dalam kategori baik. Ini karena terdapat peningkatan jumlah mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran 2019. Perbandingan capaian kinerja indikator APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha tahun 2019 dengan 2018 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.7  
Realisasi dan Capaian APK PTK Buddha





Program yang mendukung pencapaian IKU APK Pendidikan tinggi keagamaan Buddha adalah program beasiswa bidik misi, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, dan beasiswa mahasiswa berprestasi non akademik. Selain itu PTK Buddha selalu melakukan sosialisasi/promosi kepada masyarakat Buddha terutama pada daerah-daerah yang memiliki umat Buddha agar mereka yang usia kuliah tertarik dan ikut belajar pada jenjang perguruan tinggi di PTK Buddha.

Table 3.9  
Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 3

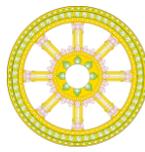
nama IKU	Target	Realisasai	Capaian Kinerja
2. Persentase siswa bidik misi yang dapat melanjutkan pendidikan	100%	103,43%	103,43%

Realisasi indkator kinerja utama persentase siswa bidik misi yang dapat melanjutkan Pendidikan sebesar 103,43 dengan capaian kinerja 103,43%. Realisasi dan capaian kinerja ini didapatkan dari data target dan realisasi program bidik misi pada dua perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri adalah:

Tabel 3.10  
Jumlah Mahasiswa Bidik Misi tahun 2019

STABN	Target	Realisasi
1. STABN Sriwijaya	88 orang	78 orang
2. STABN Raden Wijaya	174 orang	193 orang
Total	262 orang	286

Dalam perjalanannya untuk IKU siswa bidik misi yang dapat meneruskan Pendidikan pada STABN Raden Wijaya mengalami perubahan target dari 174 orang menjadi 195 orang. Target IKU siswa bidik misi yang dapat meneruskan Pendidikan pada perjanjian kinerja sebesar 100% (262 orang) dengan adanya perubahan tersebut realisasi dan capaian kinerja adalah 103,43% karena dalam menghitung realisasi dan capaian kinerja menggunakan target pada perjanjian kinerja awal tahun. Untuk indikator kinerja utama siswa bidik misi yang dapat



melanjutkan sekolah hanya terdapat pada tahun 2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, 2017, 2016 beasiswa bidik misi menjadi indikator kegiatan yaitu:

Tabel 3.11

Jumlah Mahasiswa Bidik Misi tahun 2016 - 2019

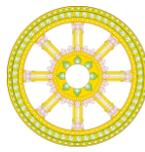
IK. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan bidik misi									
Renstra		2019		2018		2017		2016	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi
1.750	601	262	286	175	287	350	139	300	175
34,34%		103,43%		164%		39,71%		58,33	

Sasaran strategis bidang pendidikan yang ada dalam perjanjian kinerja tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan target renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja bidang agama dalam renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya dapat menjadi program pendukung pencapaian indikator kinerja utama tahun 2019. Dalam masa renstra 2015 – 2019 sering terjadi perubahan indikator kinerja utama untuk dapat memenuhi kualitas indikator kinerja utama yang semula berupa output menjadi outcome. Adapun indikator kinerja dalam renstra 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

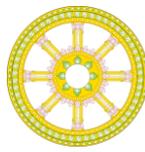
Table 3.12

Renstra bidang Pendidikan tahun 2015 – 2019

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	INDIKATOR KINERJA	Target					Total Target	Capaian Target					Total Capaian
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
11	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA														
11.2	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha													-	
	1	Meningkatnya akses masyarakat yang tidak mampu terhadap Program Indonesia pintar pada pendidikan											-		
			Jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	2,428	2,671	2,938	3,232	3,555	14,824	2,407	4,791	3,199	1,696	4396	16,489
	2	Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah											-		
			Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan	242	252	262	272	282	1,310	281	411	271	124	282	1,369
			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan agama dan keagamaan Buddha	32	1	32	1	32	98	29	1	30	35	0	95
			Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	0	0	4	4	4	12	0	0	4	4	0	8
			Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM	0	0	2	2	4	8	0	0	1	0	0	1



			Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP	0	0	2	2	4	8	0	0	1	0	0	1
			Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan Buddha	850	900	950	1,000	1,050	4,750	858	850	900	54	945	3,607
			Jumlah naskah norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang disusun	58	60	65	70	75	328	50	59	62	0	0	171
	3	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah													-
			Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan	826	828	829	830	831	4,144	972	1,365	885	334	831	4,387
			Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang menerima tunjangan profesi	249	261	275	288	303	1,376	228	240	250	60	434	1,212
			Jumlah guru yang tersertifikasi	35	101	106	111	116	469	30	100	100	0	0	230
			Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha yang menerima insentif/tunjangan	1,750	1,838	1,929	2,026	2,127	9,670	1,944	1,755	1,831	446	1914	7,890
11.3	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha														-
	1	APK Pendidikan Tinggi Agama Buddha													-
			Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	50	50	50	50	50	250	50	121	42	25	49	287
			Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa miskin	250	300	350	400	450	1,750	233	172	138	246	408	1,197
			Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan mahasiswa Buddhis	1	1	1	1	1	5	1	2	1	5	0	9
	2	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan													-
			Jumlah fasilitas pengabdian berbasis program pada masyarakat	21	25	30	35	40	151	23	22	34	26	33	138
			Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan PTAB	13	13	13	13	13	65	10	12	11	5	0	38
			Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SPM	-	2	2	2	2	8	0	2	1	0	0	3
			Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP	-	2	9	4	4	19	0	1	6	0	0	7
			Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi	1	3	3	3	3	13	1	1	3	1	3	9
			Jumlah prodi satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	3	3	5	4	7	22	2	2	5	3	7	19
			Jumlah sarana dan prasarana PTAB yang memenuhi standar	13	13	13	13	13	65	11	10	10	13	0	44
			Jumlah perpustakaan PTABN yang ditingkatkan koleksi dan prasarananya	2	2	2	2	2	10	2	4	2	2	0	10
			Jumlah layanan penyelenggaraan pendidikan pada PTABN	2	2	2	2	2	10	2	2	1	0	0	5
			Jumlah fasilitas penelitian pada PTAB	30	40	50	60	70	250	25	32	48	78	0	183
			Jumlah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal	1	2	2	2	2	9	1	1	2	0	0	4



			Jumlah penelitian yang terdaftar di HAKI	0	1	1	1	1	4	0	1	1	0	0	2
			Jumlah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)	2	2	2	2	2	10	1	2	2	0	2	7
			Jumlah naskah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perguruan tinggi	3	3	3	3	3	15	2	2	3	0	0	7
			Fasilitasi pembinaan dan pengembangan event pendidikan pada PTAB	1	1	1	1	1	5	1	3	1	0	0	5
		3	Meningkatkan Kualitas Tenaga pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha												-
			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan dosen PTAB	200	200	200	200	200	1,000	150	187	166	0	200	703
			Jumlah Dosen yang tersertifikasi	20	20	20	20	20	100	20	20	22	0	0	62
			Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya S3	3	4	4	4	4	19	0	2	3	5	4	14
			Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya	50	50	50	50	50	250	50	55	47	119	30	301
			Jumlah dosen yang menerima tunjangan fungsional	100	110	115	120	125	570	90	100	100	120	0	410
			Jumlah Dosen Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi	21	29	37	45	53	185	21	28	30	50	54	183
			Jumlah guru yang disertifikasi oleh PTABN melalui PPG	35	101	106	111	116	469	30	100	96	111	0	337

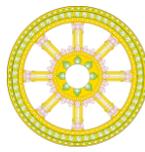
#### Sasaran Strategis 4: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tabel 3.13  
Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 4

Nama IKU	Target	Realisasai	Capaian Kinerja
1. Nilai Zona Integritas	70	67,94	97,05%

Realisasi indikator kinerja utama (IKU) nilai zona intergritas adalah 67,94 dengan capaian kinerja sebesar 97,94% dalam kategori baik. Nilai zona integritas adalah nilai murni yang diperoleh dari penilaian mandiri pembangunan zona integritas (PMPZI) melalui pengisian e PMPZI Kementerian Agama.

Kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan Zona Integritas yang pertama adalah membentuk tim PMPZI dan tim Pokja pembangunan Zona Integrias pada Ditjen Bimas Buddha. Tim Pokja pembangunan Zona Integritsa disusun sesuai dengan area perubahan yang ada pada lembar evaluasi PMPZI. Penilain dilakukan oleh tim PMPZI berdasarkan dokumen atau evidance yang tersedia sesuai dengan pernyataan dan jawaban yang dipilih.



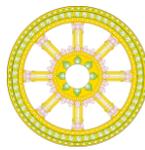
Dalam pembangunan Zona Integritas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha belum berjalan baik, disebabkan karena belum adanya kesadaran dan komitmen dari pegawai akan pentingnya pembangunan Zona Integritas. Selain itu adaya kendala dalam mengumpulkan dan menyiapkan dokumen atau evidence selama proses PMPZI berlangsung. Kesuksesan pembangunan Zona Integritas membutuhkan sebuah keseriusan dan kerjasama dari semua pegawai untuk dapat bersama-sama mewujudkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha seharusnya memiliki target untuk mencapai WBK yang dituangkan dalam Renstra 2020-2024. Indikator nilai Zona Integritas baru dijadikan indikator kinerja utama Ditjen Bimas Buddha pada tahun 2019. Sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.14  
Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 4

Nama IKU	Target	Realisasai	Capaian Kinerja
2. Persentase TLHP	75%	69,70	92,93%

Realisasi indikator kinerja utama Persentase TLHP adalah 69,70% dan capaian kinerja sebesar 92,93% dalam kategori baik. TLHP (tindak lanjut hasil pemeriksaan) baik dari audit internal yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama maupun audit eksternal yaitu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menyelesaikan semua rekomendasi baik administrasi maupun material Ditjen imas Buddha terus berusaha untuk melakukan tindak lanjut. Sampai dengan tahun 2019 Ditjen Bimas Buddha masih memiliki 124 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 115 rekomendasi. Rekomendasi ini adalah hasil audit internal dan eksternal dari tahun sampai dengan 2018. Untuk menindaklanjuti rekomendasi yang bersifat material Ditjen Bimas Buddha melakukan kesepakatan dengan pegawai untuk pengembalian temuan hasil audit dengan memotong tunjangan kinerja setiap bulan. Besaran potongan sesuai keinginan pegawai namun rata-rata dengan potongan Rp.200.000 perbulan.



Sampai dengan tahun 2019 temuan hasil audit yang bersifat material adalah Rp.1.382.553.291,- terdiri dari hasil pemeriksaan internal sebesar Rp.142.879.601 dan hasil pemeriksaan eksternal sebesar Rp.1.239.673.690,- berdasarkan data dari hasil pemutakhiran TLHP per Oktober 2019.

Tabel 3.15  
Capaian IKU 3 Sasaran Strategis 4

Nama IKU	Target	Realisasai	Capaian Kinerja
3. Nilai SAKIP	70	75,15	107,35%

Realisasi indikator kinerja utama nilai SAKIP adalah 75,15 dengan capaian kinerja sebesar 107,35% dalam kategori sangat baik. Nilai SAKIP yang digunakan sebagai pencapaian target tahun 2019 adalah penilaian SAKIP tahun 2018. Penilaian SAKIP unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dalam penilaian SAKIP ada beberapa indikator yang dinilai oleh tim penilai dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yaitu:

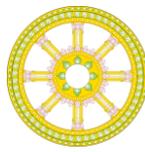
Table 3.16  
Indikator penilaian SAKIP

NO	Indikator	Bobot	Nilai	Persentase
1	Perencanaan kinerja	30,00	23,91	79,71%
2	Pengukuran kinerja	25,00	17,81	71,25%
3	Pelaporan kinerja	15,00	12,95	85,64%
4	Evaluasi kinerja	10,00	5,83	58,27%
5	Pencapaian sasaran/kinerja	20,00	14,75	73,75%
	<b>Jumlah</b>	100	75,15	

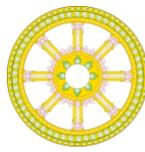
Dari hasil penilaian tersebut masih terdapat rekomendasi dari tim penilai untuk menjadi perhatian dalam penilaian SAKIP Ditjen Bimas Buddha periode berikutnya. Hal-hal yang mendapat perhatian dari tim penila adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan kinerja;

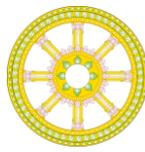
1. Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran. Unit kerja hanya focus pada RKA-K/L dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi



2. Belum ada monitoring target jangka menengah dalam renstra secara periodic dan didukung dengan mekanisme atau SOP
  3. Dokumen Renstra telah direviu dan hasilnya belum menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi)
  4. Rencana kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- B. Pengukuran kinerja;
1. Cascading IKU/pohon kinerja yang sudah dibuat belum sepenuhnya menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya terkait langsung dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diukur
  2. Ukuran kinerja individu dicantumkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata operasional dalam menguraikan uraian jabatan pokok dan target output yang tidak diukur, dan indikator kinerja individu belum memiliki hubungan kausalitas terwujudnya kinerja utama atasannya.
  3. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitoring pencapaiannya secara periodic
  4. Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward atau punishment
  5. Belum terdapat bukti yang cukup bahwa hasil pengukuran rencana aksi dijadikan dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- C. Pelaporan kinerja;
1. Pelaporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara memadai, analisis efisiensi yang diungkapkan sebatas efisiensi penggunaan anggaran
  2. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja belum dijadikan dasar pemberian reward dan punishment
- D. Evaluasi internal;
1. Sudah terdapat SOP evaluasi kinerja, namun evaluasi belum dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan. Evaluasi dilakukan dengan



- memasukkan data pencapaian kinerja melalui aplikasi SMART DJA dan e-Bapenas oleh Subbag terkait dan hanya untuk konsumsi laporan kinerja
2. Evaluasi program sudah menyimpulkan mengenai keberhasilan dan kegagalan program yang dievaluasi namun belum terdapat bukti yang rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti
  3. Evaluasi program belum memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- E. Pencapaian sasaran/kinerja;
- Capaian kinerja (sasaran) tahun 2018 turun 0,78% dari capaian kinerja tahun sebelumnya (2017)
- Dari hal yang perlu mendapat perhatian tersebut tim penilai memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut:
- a. Perencanaan kinerja;
    1. Agar renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen RKA-k/L, bukan semata-mata focus pada perencanaan anggaran dalam RKA-K/L
    2. Membuat mekanisme monitoring target jangka menengah dalam renstra secara periodik (triwulanan/semester/tahunan)
    3. Hasil rewiu renstra diharapkan membawa inovasi bagi perbaikan perencanaan kinerja
    4. Agar rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran sehingga bias selaras dengan renstra
  - b. Pengukuran kinerja;
    1. Menyempurnakan cascading IKU/pohon kinerja yang menggambarkan kinerja sesuai dengan levelnya
    2. Mengevaluasi SKP agar mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan
    3. Melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV secara periodic
    4. Membuat mekanisme pemberian reward atau punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja mulai setingkat eselon IV ke atas. Hasil pengukuran kinerja tersebut terkait jabatan/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya);



pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar

5. Agar hasil pengukuran rencana aksi sebagai dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja didokumentasikan

c. Pelaporan kinerja

1. Agar pelaporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara memadai dari sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung dan anggaran
2. Agar informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan punishment

d. Evaluasi internal

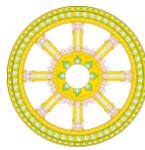
Agar memedomani SOP evaluasi kinerja yang sudah dibuat untuk kemudian melaksanakan rapat evaluasi yang dimaksud sehingga dapat disepakati rekomendasi yang bias ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata untuk perbaikana kinerja didukung dengan bukti yang memadai

e. Pencapaian sasaran/kinerja

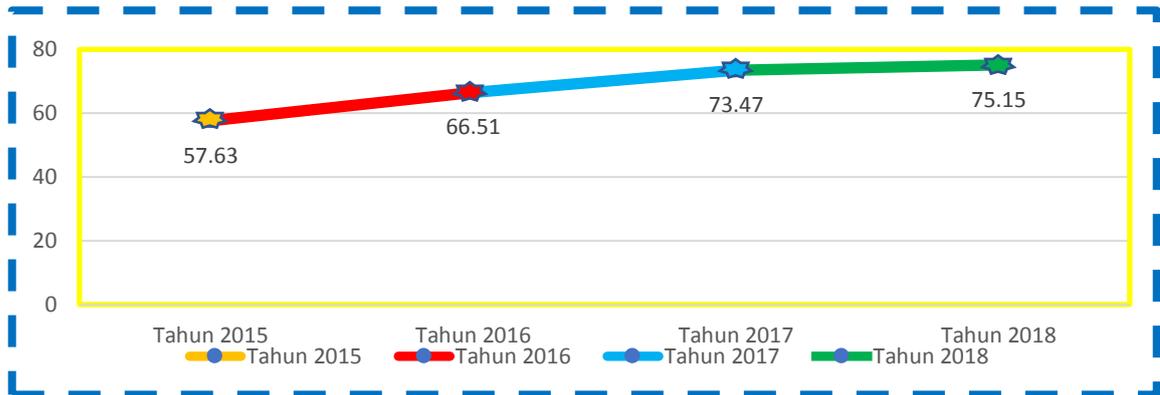
Monitoring capaian kinerja harus dilkaukan secara periodic sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan SAKIP Ditjen Bimas Buddha melakukan langkah yang pertama adalah membuat rencana aksi tindaklanjut dari rekomendasi tersebut. Ditjen Bimas Buddha terus berusaha untuk meningkatkan nilai SAKIP dengan memperbaiki penyusunan renstra dengan membentuk tim penyusun renstra tahun 2020 – 2024.

Tren nilai SAKIP Ditjen Bimas Buddha dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.8  
Trend nilai SAKIP

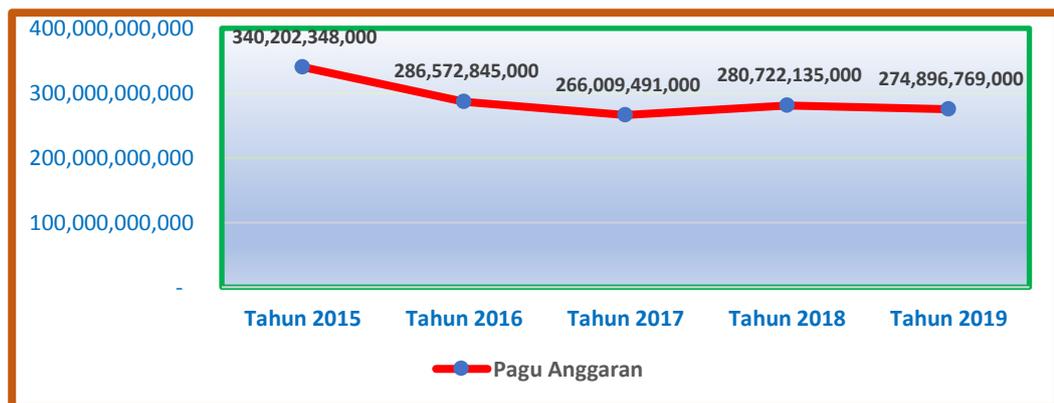


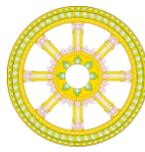
## B. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN 2019

### 1. Pagu Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama dan mewujudkan visi, misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015 – 2019, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memperoleh alokasi anggaran pada DIPA tahun 2019 sebesar Rp 274.896.769.000,-. Dengan alokasi anggaran untuk satuan kerja pusat Rp.56.213.058.000,- atau 20,45% dan untuk satuan kerja daerah Rp.218.638.711.000,- atau 79,55%.

Grafik 3.9  
Tren anggaran tahun 2015 - 2019



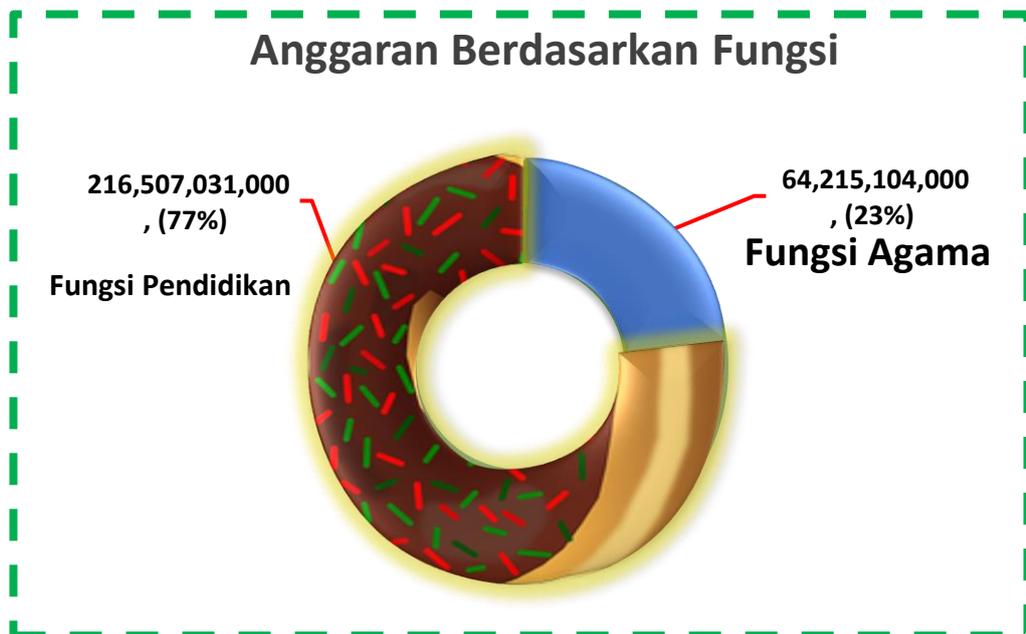


## A. Anggaran Per Fungsi

Berdasar fungsinya anggaran Ditjen Bimas Buddha dibagi menjadi dua yaitu anggaran fungsi agama dan anggaran untuk fungsi pendidikan.

Grafik 3.10

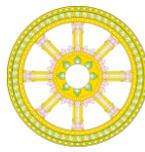
Anggaran berdasarkan fungsi



## B. Anggaran Per Kegiatan

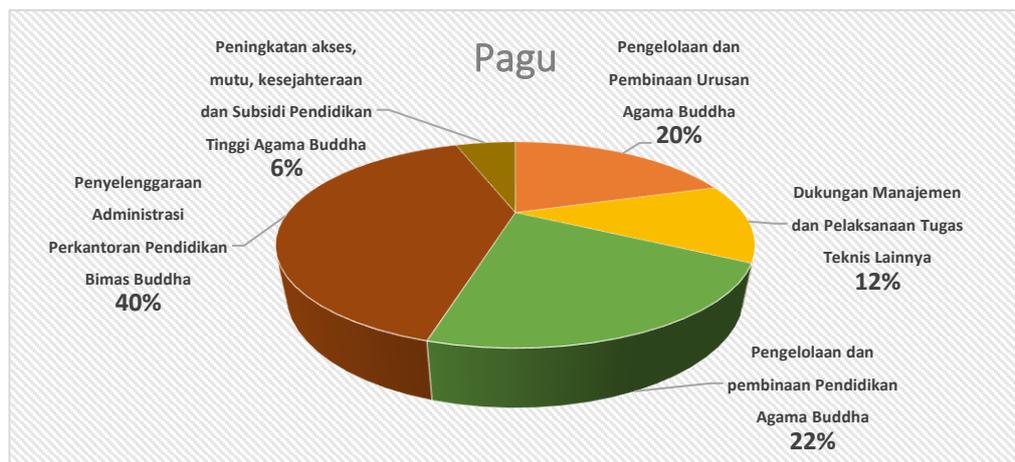
Berdasarkan kegiatan anggaran Ditjen Bimas Buddha dialokasikan untuk lima jenis kegiatan yang ada dalam DIPA yaitu, kegiatan pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, pengelolaan dan pembinaan Pendidikan agama Buddha, Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Buddha, dan Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan tinggi agama Buddha. Alokasi Anggaran perkegiatan ini dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi serta pencapaian indikator kinerja utama.

Untuk kegiatan pengelolaan dan pembinaan agama untuk menunjang sub kegiatan bidang agama, untuk kegiatan dukungan manajemen menunjang sub kegiatan bidang kesekretariatan Ditjen



Bimas Buddha, kegiatan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan dasar dan menengah menunjang sub kegiatan bidang Pendidikan dasar dan menengah, kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran bimas Buddha menunjang sub kegiatan bidang administrasi perkantoran Pendidikan yang dimanfaatkan untuk membayar gaji dan tunjangan bidang Pendidikan seperti gaji guru dan dosen, kegiatan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan tinggi agama Buddha menunjang sub kegiatan bidang Pendidikan tinggi.

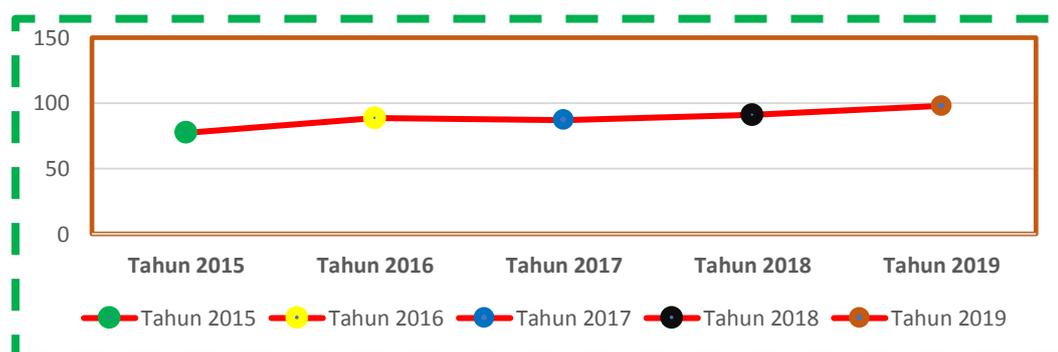
Grafik 3.11  
Anggaran berdasarkan kegiatan

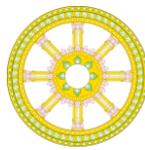


## 2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha per 31 Desember 2019 adalah Rp 269.132.030.364,- atau sebesar 97,90% dari total anggaran sebesar Rp 274.896.769.000,-. Tren pagu dan realisasi anggaran tahun 2015 – 2019 adalah:

Grafik 3.12  
Realisasi anggaran tahun 2015 - 2019

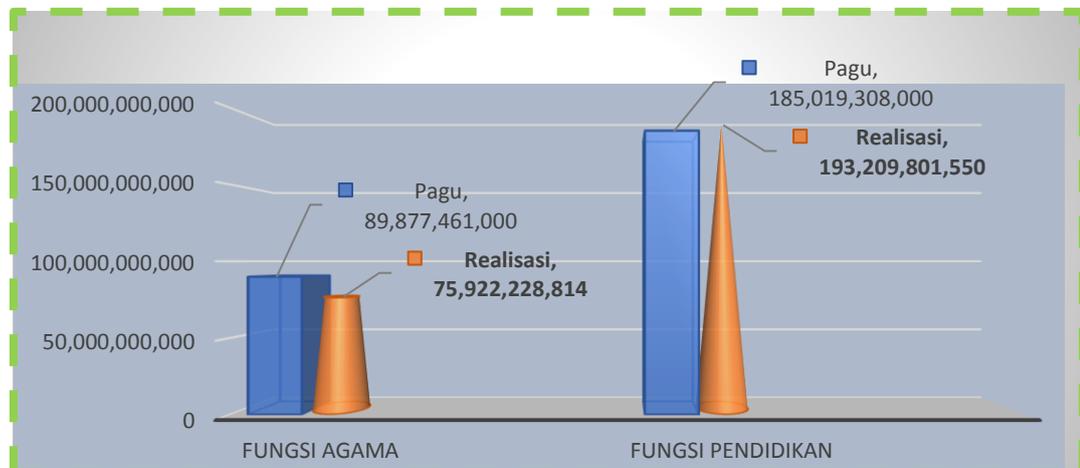




Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berdasarkan fungsi, kegiatan dan satuan kerja adalah sebagai berikut:

Grafik 3.13

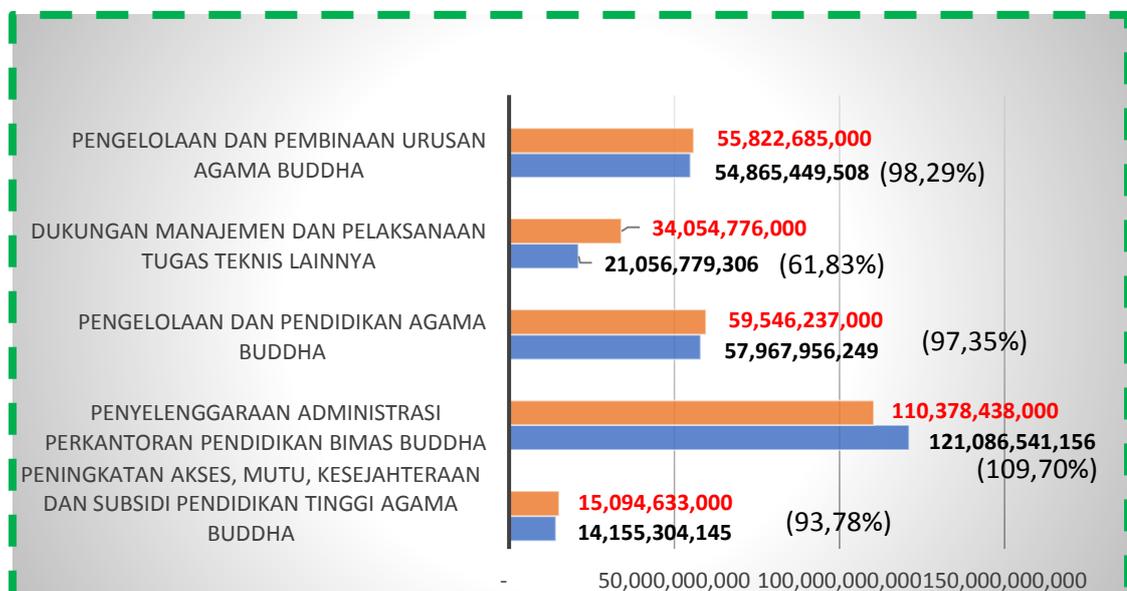
Realisasi anggaran berdasarkan fungsi



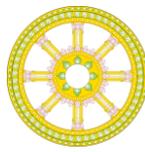
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk fungsi Pendidikan terjadi serapan anggaran lebih dari 100%. Ini terjadi karena terdapat pagu minus untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp.10.708.103.156,00.

Grafik 3.14

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan



Dari grafik diatas jelas terlihat bahwa terdapat kegiatan yang mengalami pagu minus yaitu penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas



Buddha yang anggarannya dimanfaatkan untuk membayar gaji, tunjangan, dan sertifikasi bagi guru Pendidikan agama Buddha dan dosen pada STABN. Terjadi anggaran minus pada kegiatan tersebut karena terdapat kekurangan pembayaran gaji dan merapel pembayaran kekurangan atau selisih tunjangan sertifikasi bagi guru agama Buddha dan dosen PT Negeri Keagamaan Buddha. Untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya surplus Rp.12.997.996.694,- karena terdapat kesalahan perencanaan dalam menghitung kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai dan juga efisiensi dari pelaksanaan kegiatan.

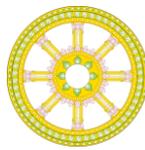
Sisa anggaran pada pengelolaan dan pembinaan Pendidikan agama Buddha sebesar Rp.1.578.280.751,- disebabkan karena adanya efisiensi dari penggandaan buku sekolah Dhammasekha, dan efisiensi akomodasi pada kegiatan - kegiatan fullboard dan fullday.

Sisa anaggaran pada peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan tinggi agama Buddha sebesar Rp.939.328.855,- karena disebabkan adanya program kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal dan adanya efisiensi pada akomodasi dari pelaksanaan kegiatan fullboard maupun fullday. Program kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal adalah:

Table 3.17

Serapan kegiatan yang kurang maksimal

NO	Program Kegiatan	Pagu	Realsasi	Selisih/sisa
1	Mahasiswa yang mendapatkan bantuan bidik misi	3.102.000.000	2.772.000.000	330.000.000
2	Penelitian dosen yang bermutu	1.431.568.000	1.204.020.300	227.548,000
3	Penelitian mahasiswa yang bermutu	612.600.000	540.100.000	72.500.000
4	Mahasiswa penerima beasiswa PPA	326.400.000	321.600.000	4.800.000
5	Dosen penerima tunjangan profesi	1.297.482.000	1.191.176.200	106.307.800

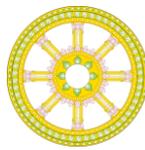


6	Dosen yang ditingkonpetensinya	2.115.912.000	2.091,485,311'	24.426.689
7	Dosen yang berkualifikasi	718.344.000	711.994.000	6.350.000
8	Pengabdian masyarakat	1.319.812.000	1.318.469.000	1.343.000
9	Mahasiswa agama Buddha yang mendapatkan pembinaan karakter	2.811.793.000	2.695,021.925	116.771.075
Jumlah				890.046.564

Sisa anggaran pada pengelolaan dan pembinaan urusan agama sebesar Rp.957.235.492 karena adanya bantuan yang tidak terserap yaitu bantuan sertifikat tanah rumah ibadah, bantuan untuk tempat ibadah sehat. Untuk tunjangan bagi penyuluh non PNS tidak terserap karena adanya keterlambatan SK penetapan penyuluh non PNS. Selain itu juga terdapat efisiensi dari akomodasi kegiatan fullboard ataupun fullday pada kegiatan bidang penyuluhan dan kelembagaan. Penggunaan anggaran Ditjen Bimas Buddha pada satuan kerja daerah yang mensupport pencapaian realisasi sebesar 97,92%. Reallisasi anggaran satuan kerja daerah ditjen Bimas Buddha adalah sebagai berikut:

Table 3.18  
Realisasi anggaran satker daerah

No	Keterangan	Pagu Total	Realisasi Total	%
1	LAMPUNG	8,593,628,000.00	10,319,339,126.00	120.08%
2	JAWA TENGAH	22,439,801,000.00	25,692,721,642.00	114.50%
	689088   SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH	8,858,265,000.00	9,379,622,726.00	105.89%
3	SUMATERA UTARA	8,901,119,000.00	9,973,135,709.00	112.04%
4	JAWA TIMUR	12,412,603,000.00	13,845,845,839.00	111.55%
5	SUMATERA SELATAN	5,157,978,000.00	5,727,085,031.00	111.03%
6	KALIMANTAN BARAT	10,428,929,000.00	11,295,147,515.00	108.31%
7	JAWA BARAT	7,052,533,000.00	7,571,511,363.00	107.36%
8	SULAWESI SELATAN	2,523,021,000.00	2,685,966,988.00	106.46%
9	SULAWESI TENGGARA	1,744,319,000.00	1,838,983,257.00	105.43%
10	DKI JAKARTA	8,697,822,000.00	9,026,139,671.00	103.77%
	445319   DIREKTORAT JENDERAL BIMAS BUDDHA	56,213,058,000.00	42,425,427,906.00	75.47%
11	MALUKU	1,319,893,000.00	1,352,094,473.00	102.44%
12	SULAWESI TENGAH	3,554,282,000.00	3,610,182,387.00	101.57%



13	PAPUA BARAT	3,690,727,000.00	3,713,438,523.00	100.62%
14	BALI	9,247,350,000.00	9,187,696,226.00	99.35%
15	SUMATERA BARAT	1,521,986,000.00	1,509,237,729.00	99.16%
16	KALIMANTAN TIMUR	5,275,881,000.00	5,225,559,421.00	99.05%
17	JAMBI	5,379,113,000.00	5,325,293,887.00	99.00%
18	KALIMANTAN SELATAN	3,905,154,000.00	3,863,743,682.00	98.94%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,728,238,000.00	1,705,300,006.00	98.67%
20	GORONTALO	584,930,000.00	577,143,930.00	98.67%
21	KEPULAUAN RIAU	9,653,740,000.00	9,477,872,271.00	98.18%
22	BANTEN	11,716,284,000.00	11,499,531,820.00	98.15%
	506600   SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN	10,634,461,000.00	11,849,032,329.00	111.42%
23	KALIMANTAN TENGAH	3,684,904,000.00	3,614,647,629.00	98.09%
24	PAPUA	4,824,409,000.00	4,723,470,143.00	97.91%
25	BENGKULU	2,569,922,000.00	2,514,701,733.00	97.85%
26	KALIMANTAN UTARA	1,821,154,000.00	1,773,437,171.00	97.38%
27	RIAU	11,021,754,000.00	10,695,651,758.00	97.04%
28	DI YOGYAKARTA	3,620,346,000.00	3,509,919,252.00	96.95%
29	NUSA TENGGARA BARAT	15,085,275,000.00	14,485,093,991.00	96.02%
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6,093,261,000.00	5,837,132,448.00	95.80%
31	SULAWESI UTARA	2,218,130,000.00	2,082,479,759.00	93.88%
32	SULAWESI BARAT	1,223,226,000.00	1,146,771,739.00	93.75%
33	ACEH	1,499,273,000.00	1,369,302,284.00	91.33%
		274,896,769,000.00	270,429,661,364.00	98.37%

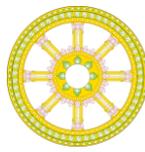
### C. Sumber Daya Ditjen Bimas Buddha

Sumber daya yang dimiliki oleh Ditjen Bimas Buddha dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Sumber daya manusia, Anggaran, dan Sarana dan prasarana. Dalam kurun waktu renstra 2015 – 2019 dari ketiga sumber daya yang dimiliki tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berikut adalah analisis sumber daya Ditjen Bimas Buddha.

#### 1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sebagaimana profil pegawai yang dimiliki oleh Ditjen Bimas Buddha sampai tahun 2019 sebanyak 260 orang yang dibagi pusat 90 orang dan untuk satuan kerja tingkat provinsi/kabupaten/kota sebanyak 164 orang. Dengan jumlah pegawai yang demikian minim Ditjen Bimas Buddha terus berusaha untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. Untuk satuan kerja daerah dengan 34 Provinsi, 415 Kabupaten, 1 Kabupaten Administrasi, 93 Kota, dan 5 Kota Administrasi.

Jumlah pegawai pusat yang berjumlah 96 tersebut pegawai PNS 66 orang dan 30 orang pegawai honor/pramubakti. Dengan kondisi dan komposisi

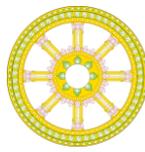


pegawai yang demikian dapat diartikan bahwa pegawai honor tersebut sangat dibutuhkan karena dapat membantu dari pencapaian kinerja organisasi.

Dengan jumlah pegawai yang dimiliki untuk satuan kerja daerah tidaklah mencukupi. Saat ini Ditjen Bimas Buddha memiliki pegawai yang ada di tingkat provinsi 33 orang sebagai Pembimas Buddha yang dibantu<sup>1</sup> sampai dengan 3 orang pegawai honor atau pramubakti dan jika ada yang PNS cuma 1 atau 2 orang. Untuk satuan kerja Kabupaten/kota pegawai sebanyak 39 orang sebagai Kasi Bimas Buddha dan Penyelenggara Bimas Buddha yang dibantu oleh pegawai honor/pramubakti, jika ada pegawai yang PNS paling banyak 1 orang bahkan ada Kasi/Penyelenggara yang tidak memiliki pegawai dibawahnya. Ditjen Bimas Buddha juga memiliki penyuluh agama Buddha PNS dengan jumlah 48 orang. Dengan keterbatasan sumber daya manusia Ditjen Bimas Buddha selalu melakukan upaya untuk penambahan pegawai terutama untuk satuan kerja daerah yang ternyata belum pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika dilihat dari urgensinya satuan kerja daerah tersebut sangat membutuhkan pegawai karena mereka merupakan garda depan dalam mengemban tugas pembinaan bidang agama Buddha kepada masyarakat.

## **2. Anggaran Ditjen Bimas Buddha Tahun 2019**

Pendanaan seluruh program bimbingan masyarakat Buddha bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mendapat dana dari APBN sebesar Rp. 274.896.769.000,-. Dari dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2019. Dana dari APBN tahun 2019 terserap sebesar Rp.269.132.030.364,- atau 97,90%. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memiliki dua unit pelaksana teknis (UPT) yaitu STAB Negeri Sriwijaya dan STAB Negeri Raden Wijaya. Kedua PTKN tersebut berkontribusi terhadap pendapatan negara berupa setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil pembayaran biaya studi oleh mahasiswa pada STAB Negeri. Pada tahun 2019 hasil PNBP kedua STAB tersebut sebesar Rp.499.634.085,-.



Dari rerata indeks capaian kinerja 1046,04% dan serapan anggaran 97,90% dapat dianggap bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berkinerja sangat baik, karena capaian kinerja lebih tinggi dibanding dengan serapan anggaran dan terdapat efisiensi dana APBN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebesar 2,1% atau Rp.5.764.738.636,-, efisiensi ini didapat dari perjalanan, akomodasi kegiatan dan juga program kegiatan yang tidak maksimal.

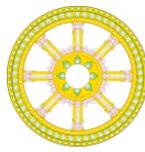
Dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berupaya mencapai tujuan organisasi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra. Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki pada satuan kerja pusat maupun daerah Ditjen Bimas Buddha selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dengan anggaran yang ada pada tahun 2019 Ditjen Bimas Buddha telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjalankan program bimbingan masyarakat Buddha dengan maksimal terbukti dengan hasil survey indeks keshalihan sosial dan indeks kepuasan layanan masyarakat dengan hasil sangat memuaskan.

### **3. Sarana dan Prasarana Ditjen Bimas Buddha**

Dari tahun ke tahun Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha masih terus mengalami permasalahan dalam sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan perkantoran sehari – hari. Tahun 2019 prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan masih terdapat sarana yang sering terjadi trobel. Sarana yang digunakan oleh Ditjen Bimas Buddha untuk kantor saat ini hanya menempati lantai 16 dan seperan lantai 15 gedung Kementerian Agama jalan Thamrin no.6 Jakarta pusat.

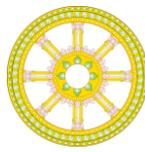
Prasarana yang digunakan oleh pegawai Ditjen Bimas Buddha sebagian sudah ketinggal perkembangan teknologi, seperti laptop yang digunakan ada yang hasil pengadaan tahun 2000an. Ditjen Bimas Buddha sendiri sebenarnya sudah mengembangkan sebuah sistem pelayanan perkantoran terpusat dengan membangun DMS (dokumen manajemen sistem) tahun 2012 yang diharapkan itu dapat membantu kelancaran kegiatan pegawai. Seiring berjalannya waktu



ternyata sistem tersebut mengalami kendala yang sampai dengan tahun 2019 terus terjadi. Ini disebabkan karena pemeliharaan yang kurang maksimal serta kapasitas perangkat yang digunakan kurang memadai.

Dengan banyaknya prasarana yang sudah berumur dan perlu diremajakan namun dari tahun ke tahun selama renstra 2015 – 2019 untuk belanja modal sarana prasarana seperti laptop, personal computer (PC) sangatlah terbatas, karena barang yang sudah berumur belum dilakukan pemutihan atau penghapusan dari barang milik negara. Dan untuk perangkat lunaknya atau software yang digunakan selama ini masih ada yang menggunakan produk illegal terutama adalah software untuk kepentingan design seperti photoshop, dan coreldraw. Sebagai institusi pemerintah namun masih menggunakan produk sofyware illegal, sebaiknya untuk mendapatkan hasil kerja yang baik harus didukung oleh sarana dan prasana yang memadai. Data BMN untuk prasarana pendukung kegiatan pegawai Ditjen Bimas Buddha untuk jumlah laptop 65 buah, personal computer 23 buah, printer 30 buah, scanner 8 buah dan yang paling tua adalah buatan tahun 2007 yang masih dipaksa untuk beroperasi. Sebenarnya dari segi jumlah sudah mencukupi tetapi dari segi kualitas dan teknologinya sudah tertinggal dengan kondisi yang ada saat ini.

Selain prasarana diatas ada satu hal yang sangat penting dan mendukung kinerja yaitu jaringan internet yang selama ini menjadi kendala dalam mencari informasi melalui jaringan media elektronik. Untuk jaringan yang tidak stabil tersebut membuat pekerjaan seperti pengiriman surat elektronik atau email terhambat. Alangkah baiknya untuk jaringan internet ini Ditjen Bimas Buddha melakukan negosiasi dengan Sekretariat Jenderal untuk dapat berlangganan sendiri dengan penyedia jaringan seperti Telkom.



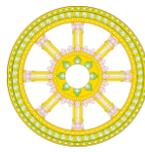
## PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen Bimas Buddha disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2019 merupakan hasil evaluasi kinerja Ditjen Bimas Buddha selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan bimbingan masyarakat Buddha yang tertuang dalam indikator kinerja utama Ditjen Bimas Buddha. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan Ditjen Bimas Buddha secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan laporan kinerja sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja dan Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Ditjen Bimas Buddha.

Pelaksanaan program dan anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun masih belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran sebesar 97,90% dan rerata tingkat capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 106,04% ini dalam kategori sangat baik. Indikator kinerja dengan realisasi capaian kinerja dengan kategori sangat baik dengan capaian diatas 100% sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yaitu indeks keshalihan sosial, indeks layanan keagamaan Buddha, persentase siswa penerima bidik misi yang dapat melanjutkan Pendidikan, dan nilai SAKIP.

Sasaran strategis 1 meningkatnya kualitas kehidupan umat Buddha dengan satu indikator kinerja utama yaitu indeks keshalihan sosial umat



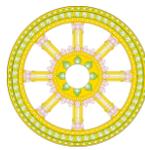
beragama Buddha target 70% dengan realisasi 85,044% dan capaian kinerja 121,49%. Dengan capaian kinerja indeks keshalihan sosial diatas 100% dapat diartikan bahwa sasaran strategis 1 dapat tercapai dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja sasaran strategis 2 meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan adalah 113,04% yang didukung oleh dua indikator kinerja utama yaitu; 1. Persentase Lembaga keagamaan Buddha yang berbadan hukum target 75% realisasi 71,54% dengan capaian kinerja 95,46%. Dan indikator indeks layanan keagamaan Buddha target 75 realisasi 97,97 dengan capaian kinerja 130,62%. Dengan rerata capaian kinerja dari kedua indkator diatas 100% dapat diartikan bahwa untuk sasaran strategis 2 dapat tercapai dengan kategori sangat baik.

Sasaran strategis 3 meningkatkan akses layanan Pendidikan dengan capaian kinerja 101.72% yang didukung oleh dua indikator kinerja utama yaitu: angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Buddha target 0,006 realisasi 0,006 dengan capaian kinerja 100%. Untuk indikator persentase siswa penerima bidik misi yang dapat melanjutkan pendidikan target 100% realisasi 103,43% dengan capaian kinerja 103,43%. Dengan rerata capaian kinerja dari kedua indkator diatas 100% dapat diartikan bahwa untuk sasaran strategis 3 dapat tercapai dengan kategori sangat baik.

Sasaran strategis 4 meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan capaian kinerja 99,11% yang didukung oleh 3 indikator kinerja utama yaitu: nilai zona integritas target 70 realisasi 67,94 dengan capaian kinerja 97,05%. Indikator persentase TLHP target 75% realisasi 69,70% dengan capaian kinerja 92,93%, dan indikator nilai SAKIP target 70 realisasi 75,15 dengan capaian kinerja 107,35%. Dengan rerata capaian kinerja dari ketiga indikator sebesar 99,11% dapat diartikan bahwa untuk sasaran strategis 4 dapat tercapai dengan kategori baik.

Dari capaian kinerja organisasi sebesar 106,04% dan realisasi anggaran 97,90% dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berkinerja sangat baik. Dari semua sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum berhasil dicapai dengan baik. Dengan tercapainya kinerja tahun 2019 Ditjen Bimas Buddha belum dapat menyimpulkan bahawa visi, misi dan tujuan organisasi tercapai karena renstra tidak menjadi



acuan dalam perencanaan. Kedepan renstra Ditjen Bimas Buddha wajib menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja selama lima tahun. Dengan menjadikan renstra sebagai panduan dalam perencanaan selama lima tahun akan memudahkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Bimas Buddha. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Ditjen Bimas Buddha, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.

Jakarta, Februari 2020

Direktur Jenderal



CALIADI